

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, Juni 2024, Halaman 291-297
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11418462)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11418462>

Relasi Bisnis dan Politik di Indonesia Dalam Konteks Isu Kontemporer: Dampak, Tantangan, dan Implikasinya

Agatha Cristy Siregar^{1*}, Junita Mawartina², Risma Nursuhayla³, Kevin Immanuel Manurung⁴
¹²³⁴Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email: cristyagatha944@gmail.com¹, junitamawartina16@gmail.com², kevinmanurung2611@gmail.com³,
rismanursuhayla@gmail.com⁴

Abstrak

Relasi antara bisnis dan politik di Indonesia memiliki sejarah panjang dan kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Jurnal ini mengeksplorasi hubungan tersebut dengan fokus pada isu-isu kontemporer seperti korupsi, kebijakan ekonomi, dan regulasi lingkungan. Di tengah perubahan politik dan ekonomi yang cepat, interaksi antara sektor bisnis dan politik sering kali menjadi katalis bagi kebijakan yang menguntungkan kepentingan tertentu, sering kali mengorbankan kepentingan publik. Melalui analisis literatur dan studi kasus, jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari korupsi yang melibatkan pengusaha dan pejabat publik, tantangan dalam pembentukan kebijakan ekonomi yang adil, serta implikasi dari lobi bisnis terhadap regulasi lingkungan. Penelitian ini menemukan bahwa korupsi merusak kepercayaan publik dan menghambat pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekonomi sering kali menguntungkan korporasi besar dibandingkan usaha kecil dan menengah, dan regulasi lingkungan sering kali dilemahkan oleh pengaruh bisnis besar. Kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi peneliti, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam interaksi antara bisnis dan politik di Indonesia.

Kata Kunci: *Korupsi, Kebijakan Ekonomi, Regulasi Lingkungan.*

Abstract

The relationship between business and politics in Indonesia has a long and complex history that affects various aspects of social and economic life. This journal explores this relationship with a focus on contemporary issues such as corruption, economic policy, and environmental regulation. Amid rapid political and economic changes, the interaction between the business and political sectors often catalyzes policies that benefit certain interests, frequently at the expense of public interests. Through literature analysis and case studies, this journal aims to identify the impacts of corruption involving entrepreneurs and public officials, challenges in forming fair economic policies, and the implications of business lobbying on environmental regulation. The study finds that corruption undermines public trust and hinders economic growth, economic policies often favor large corporations over small and medium enterprises, and environmental regulations are frequently weakened by the influence of big business. The conclusions and recommendations provided are expected to offer new insights for researchers, policymakers, and the general public in efforts to enhance transparency and accountability in the interaction between business and politics in Indonesia.

Keywords: *Corruption, Economic Policy, Environmental Regulation.*

Article Info

Received date: 08 May 2024

Revised date: 18 May 2024

Accepted date: 26 May 2024

PENDAHULUAN

Hubungan antara bisnis dan politik di Indonesia selalu menjadi topik yang relevan dan penting untuk dipahami, terutama dalam konteks perubahan politik dan ekonomi yang cepat. Sejak era Orde Baru hingga era Reformasi, relasi antara bisnis dan politik telah mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan perubahan dalam struktur kekuasaan dan kebijakan ekonomi negara. Dalam beberapa dekade terakhir, isu-isu seperti korupsi, kebijakan ekonomi yang tidak stabil, dan regulasi lingkungan yang ketat semakin menambah urgensi untuk memahami interaksi antara kedua sektor ini secara mendalam. Korupsi sering kali menjadi penghalang utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi dan politik saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain, sering kali merugikan masyarakat luas. Korupsi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap

hingga penggelapan dana, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan melemahkan fondasi demokrasi. Di sisi lain, kebijakan ekonomi yang tidak stabil juga menjadi tantangan besar. Kebijakan yang sering berubah-ubah tanpa perencanaan yang matang dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Kebijakan ekonomi yang dihasilkan dari hubungan antara bisnis dan politik sering kali mencerminkan kepentingan kelompok bisnis tertentu, sementara kepentingan masyarakat umum sering kali terabaikan. Misalnya, kebijakan mengenai ekspor dan impor yang lebih menguntungkan perusahaan besar dibandingkan usaha kecil dan menengah telah menimbulkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar (Aspinall, 2013).

Regulasi lingkungan juga menjadi isu penting dalam relasi bisnis dan politik di Indonesia. Di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, regulasi yang efektif dan berkelanjutan sangat diperlukan. Namun, pengaruh kuat bisnis besar dalam penyusunan regulasi lingkungan sering kali berusaha melemahkan peraturan yang dianggap merugikan mereka. Contoh nyata adalah lobi industri kelapa sawit dan pertambangan yang terus berupaya mempengaruhi kebijakan deforestasi dan emisi karbon (Winters, 2021). Secara keseluruhan, relasi antara bisnis dan politik di Indonesia adalah interaksi yang kompleks dan penuh tantangan. Pentingnya memahami dinamika ini tidak hanya untuk kepentingan akademis, tetapi juga untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan menggali lebih dalam mengenai dampak, tantangan, dan implikasi dari hubungan ini, kita dapat menemukan cara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana bisnis dan politik berinteraksi di Indonesia, serta bagaimana interaksi ini membentuk lanskap sosial, ekonomi, dan lingkungan negara ini (Fukuoka, 2022).

LANDASAN TEORI

Relasi bisnis dan politik di Indonesia dapat dipahami melalui beberapa teori, termasuk teori elit, teori pluralis, dan teori neoinstitusional. Ketiga teori ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana hubungan antara bisnis dan politik terbentuk dan beroperasi, serta dampaknya terhadap masyarakat dan kebijakan publik.

a. Teori Elit

Teori elit berpendapat bahwa kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil individu atau kelompok yang memiliki kekayaan dan pengaruh yang luar biasa. Dalam konteks Indonesia, teori ini dapat diilustrasikan melalui pengaruh para oligarki dan konglomerat yang memiliki jaringan kuat dengan pejabat politik (Hadiz, 2018). Sejak era Orde Baru hingga sekarang, sejumlah kecil elit ekonomi telah mampu mempengaruhi kebijakan politik melalui donasi kampanye, lobi, dan korupsi. Mereka menggunakan kekayaan dan koneksi politik mereka untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka, sering kali dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas. Contoh nyata dari fenomena ini adalah bagaimana beberapa keluarga dan kelompok bisnis besar mendominasi sektor-sektor strategis seperti energi, sumber daya alam, dan infrastruktur, serta bagaimana mereka berhasil mempengaruhi regulasi dan kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka (Robison et al, 2014).

b. Teori Pluralis

Berbeda dengan teori elit, teori pluralis menekankan keberagaman kekuatan dalam masyarakat dan mengakui adanya berbagai kelompok kepentingan yang bersaing untuk mempengaruhi kebijakan. Dalam teori ini, bisnis hanyalah salah satu dari banyak aktor yang mencoba mempengaruhi proses politik. Di Indonesia, hal ini terlihat dalam bentuk asosiasi bisnis, serikat pekerja, LSM lingkungan, dan kelompok kepentingan lainnya yang berpartisipasi dalam dialog kebijakan. Teori pluralis menyoroti bahwa meskipun kelompok bisnis besar memiliki pengaruh yang signifikan, mereka tidak selalu mendominasi proses politik karena adanya mekanisme checks and balances dari kelompok kepentingan lain. Misalnya, advokasi dan tekanan dari kelompok lingkungan dan masyarakat sipil telah berhasil menunda atau membatalkan beberapa proyek yang dianggap merusak lingkungan, meskipun proyek tersebut didukung oleh bisnis besar dan politisi berpengaruh (Ford et al, 2014).

c. Teori Neoinstitusional

Teori neoinstitusional melihat hubungan antara bisnis dan politik dalam kerangka kelembagaan yang formal dan informal yang mengatur interaksi antara kedua sektor tersebut. Menurut teori ini, baik bisnis maupun politik beroperasi dalam konteks aturan, norma, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara dan masyarakat. Di Indonesia, kerangka

kelembagaan ini mencakup regulasi hukum, kebijakan pemerintah, serta norma dan praktik yang berkembang dalam masyarakat. Teori neoinstitusional membantu menjelaskan bagaimana institusi formal seperti undang-undang anti-korupsi dan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran penting dalam membatasi dan mengatur interaksi antara bisnis dan politik. Selain itu, institusi informal seperti budaya patronase dan nepotisme juga mempengaruhi bagaimana bisnis dan politik berinteraksi. Misalnya, praktik-praktik nepotisme dan kronisme yang masih kuat dalam budaya politik Indonesia sering kali memperkuat hubungan tidak sehat antara bisnis dan politik, di mana keputusan kebijakan dibuat berdasarkan hubungan pribadi daripada kepentingan publik (Mietzner, 2015).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kasus. Sumber data berasal dari artikel jurnal, laporan kebijakan, dan berita terkini yang relevan dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi dan Transparansi

Korupsi merupakan salah satu isu utama dalam relasi bisnis dan politik di Indonesia, mencerminkan masalah struktural yang mendalam dalam tata kelola negara. Korupsi terjadi ketika pejabat publik, politisi, atau pemimpin perusahaan menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Fenomena ini tidak hanya mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan skala, dari suap kecil hingga skandal besar yang melibatkan miliaran rupiah. Salah satu contoh paling terkenal adalah kasus korupsi proyek e-KTP, yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha. Proyek yang seharusnya memodernisasi sistem administrasi kependudukan ini justru menjadi ajang korupsi besar-besaran, dengan dana proyek yang disalahgunakan hingga mencapai triliunan rupiah. Kasus ini tidak hanya menunjukkan bagaimana uang publik dicuri, tetapi juga bagaimana proses hukum dan pemerintahan bisa dimanipulasi oleh kekuatan bisnis dan politik yang korupsi (Aspinall et al, 2018).

Selain proyek e-KTP, sektor sumber daya alam di Indonesia juga merupakan ladang subur bagi korupsi. Praktik suap dan gratifikasi dalam perizinan tambang, perkebunan kelapa sawit, dan sektor kehutanan adalah hal yang sering terjadi. Kasus suap dalam sektor sumber daya alam sering kali melibatkan pejabat lokal dan pusat yang menerima uang dari pengusaha untuk mendapatkan izin eksploitasi. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Dampak dari korupsi dalam relasi bisnis dan politik sangat merusak :

- 1) Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Ketika masyarakat melihat bahwa pejabat publik dan pengusaha besar dapat lolos dari hukuman meskipun terlibat dalam korupsi besar, kepercayaan mereka terhadap sistem hukum dan pemerintahan berkurang drastis. Hal ini dapat menyebabkan apatisisme politik dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi (Slater, 2017).
- 2) Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya sering kali diselewengkan untuk keuntungan pribadi. Selain itu, korupsi juga menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha. Perusahaan yang tidak mau terlibat dalam praktik suap sering kali kesulitan mendapatkan izin atau kontrak, sementara perusahaan yang terlibat dalam korupsi mungkin mendapatkan keuntungan jangka pendek tetapi berisiko terkena sanksi hukum di masa depan. Lingkungan bisnis yang tidak sehat ini menghalangi investasi asing dan domestik, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi (Leod, 2015).
- 3) Korupsi berdampak negatif pada distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Sumber daya yang dicuri oleh pejabat korup dan pengusaha besar sering kali berasal dari anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program sosial yang mendukung masyarakat miskin dan rentan. Akibatnya, kesenjangan ekonomi semakin melebar dan tingkat kemiskinan tetap tinggi.

Untuk mengatasi masalah korupsi, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat lembaga anti-korupsi seperti Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memberikan dukungan politik dan sumber daya yang memadai. Selain itu, sistem hukum perlu diperkuat untuk memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum dengan tegas tanpa pandang bulu. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan dan bisnis juga harus ditingkatkan melalui penggunaan teknologi informasi dan partisipasi publik yang lebih besar.

Pendidikan anti-korupsi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan etika juga merupakan bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, tekanan publik terhadap pejabat dan pengusaha yang korup dapat meningkat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, korupsi dalam relasi bisnis dan politik di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multifaset untuk mengatasinya. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, Indonesia dapat bergerak menuju tata kelola yang lebih bersih dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Chalmers, 2016).

Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi yang dihasilkan dari hubungan antara bisnis dan politik di Indonesia sering kali mencerminkan kepentingan kelompok bisnis tertentu, yang berpengaruh besar dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi, yang secara signifikan memengaruhi struktur ekonomi negara. Contoh nyata dari ketidakadilan ini terlihat dalam kebijakan mengenai ekspor dan impor, di mana perusahaan besar cenderung mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan usaha kecil dan menengah (UKM).

- a) Kebijakan Ekspor dan Impor, Salah satu area di mana pengaruh kelompok bisnis besar sangat terlihat adalah dalam kebijakan ekspor dan impor. Perusahaan besar, dengan sumber daya dan koneksi politik yang luas, sering kali mampu mempengaruhi regulasi dan mendapatkan perlakuan istimewa, seperti tarif yang lebih rendah, akses ke fasilitas perdagangan, dan insentif pajak. Sebaliknya, UKM sering kali terpinggirkan dalam proses ini, menghadapi tarif yang lebih tinggi dan kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif yang kompleks. Contoh spesifik dari ketidakadilan ini dapat dilihat dalam sektor pertanian dan manufaktur. Perusahaan besar dalam industri kelapa sawit, misalnya, sering kali mendapatkan dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi dan fasilitas ekspor, sementara petani kecil dan pengusaha UKM kesulitan mendapatkan akses yang sama. Demikian pula, dalam sektor manufaktur, perusahaan besar yang memiliki hubungan kuat dengan pejabat pemerintah sering kali lebih mudah mendapatkan izin impor bahan baku dan mesin, sementara UKM harus berjuang dengan birokrasi yang rumit dan biaya yang tinggi (Hart, 2018).
- b) Investasi Asing dan Dampaknya, Ketidakadilan ini menjadi lebih menonjol dalam konteks upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi asing. Kebijakan pro-investasi sering kali dirancang untuk menarik perusahaan multinasional dengan menawarkan insentif besar, seperti keringanan pajak, kemudahan izin usaha, dan akses ke infrastruktur. Meskipun investasi asing dapat membawa manfaat seperti peningkatan lapangan kerja dan transfer teknologi, kebijakan ini sering kali tidak memperhitungkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UKM. UKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia dan penyedia utama lapangan kerja, sering kali tidak mendapatkan dukungan yang setara. Mereka menghadapi tantangan seperti akses terbatas ke pembiayaan, infrastruktur yang kurang memadai, dan kebijakan yang lebih menguntungkan perusahaan besar. Akibatnya, kesenjangan ekonomi semakin lebar, dengan segelintir perusahaan besar mendominasi pasar dan mendapatkan keuntungan yang tidak proporsional, sementara UKM berjuang untuk bertahan dan berkembang (Sakai et al, 2017).
- c) Isu Keadilan Ekonomi, Isu ini menjadi sorotan dalam debat publik tentang keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan. Banyak pihak berpendapat bahwa kebijakan yang terlalu pro-bisnis besar dapat merugikan kesejahteraan masyarakat luas dan menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif. Ada argumen bahwa pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang, yang tidak hanya menarik investasi asing tetapi juga mendukung pengembangan UKM dan ekonomi lokal. Salah satu solusi yang diusulkan adalah memperkuat kebijakan yang mendukung UKM, seperti penyederhanaan proses perizinan, peningkatan akses ke pembiayaan, dan penyediaan pelatihan dan dukungan teknis. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan ekonomi, memastikan bahwa kepentingan semua

pemangku kepentingan, termasuk UKM dan masyarakat umum, dipertimbangkan secara adil (Butt, 2015).

- d) Kebijakan yang Tidak Adil, Contoh kebijakan yang menunjukkan ketidakadilan ini adalah regulasi sektor energi. Perusahaan besar yang bergerak di bidang energi, seperti minyak dan gas, sering kali mendapatkan kontrak yang menguntungkan dan insentif besar dari pemerintah, sementara perusahaan kecil dan menengah yang bergerak di bidang energi terbarukan atau teknologi hijau menghadapi lebih banyak hambatan regulasi dan kurangnya dukungan. Selain itu, dalam sektor perbankan, kebijakan yang mendukung konsolidasi perbankan besar dapat merugikan bank-bank kecil yang melayani UKM dan komunitas lokal. Bank-bank besar yang memiliki akses lebih mudah ke modal dan teknologi canggih bisa mendominasi pasar, meninggalkan bank-bank kecil yang memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi lokal (Warbutton, 2016).

Kebijakan ekonomi yang terlalu menguntungkan kelompok bisnis besar tidak hanya menciptakan ketidakadilan ekonomi tetapi juga dapat merusak struktur ekonomi jangka panjang negara. Untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang lebih adil dan seimbang, yang mendukung pengembangan UKM dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan juga sangat penting untuk mencegah dominasi kelompok bisnis besar dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat luas selalu diprioritaskan (Lane, 2014).

3. Regulasi Lingkungan

Di era perubahan iklim, regulasi lingkungan telah menjadi topik penting dalam relasi bisnis dan politik di Indonesia. Pengaruh bisnis besar dalam penyusunan regulasi lingkungan sangat signifikan, dengan banyak perusahaan besar berusaha melemahkan regulasi yang dianggap merugikan bisnis mereka. Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi upaya pemerintah dan masyarakat untuk melindungi lingkungan dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim (Eilenberg, 2014).

1) Lobi Industri Kelapa Sawit

Industri kelapa sawit adalah salah satu contoh yang paling menonjol dari pengaruh bisnis besar dalam regulasi lingkungan di Indonesia. Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dan industri ini menyumbang sebagian besar pendapatan ekspor negara. Namun, ekspansi perkebunan kelapa sawit sering kali dilakukan dengan mengorbankan hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Lobi industri kelapa sawit telah berhasil mempengaruhi berbagai kebijakan lingkungan, termasuk regulasi deforestasi dan emisi karbon. Misalnya, meskipun pemerintah telah menetapkan moratorium pada pembukaan lahan hutan primer dan lahan gambut, tekanan dari industri kelapa sawit telah menyebabkan implementasi yang lemah dan pengecualian tertentu yang memungkinkan terus berlangsungnya deforestasi. Lobi ini juga menentang kebijakan yang lebih ketat mengenai penelusuran sumber bahan baku dan sertifikasi keberlanjutan, yang dapat mempengaruhi reputasi dan akses pasar internasional.

2) Pengaruh Industri Pertambangan

Industri pertambangan juga memainkan peran besar dalam pengaruh terhadap regulasi lingkungan di Indonesia. Industri ini mencakup penambangan batu bara, nikel, emas, dan bahan tambang lainnya, yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Penambangan sering kali menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan tanah longsor, yang berdampak buruk pada masyarakat lokal dan lingkungan. Lobi industri pertambangan berusaha melemahkan regulasi yang mengatur dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Misalnya, peraturan mengenai reklamasi lahan bekas tambang dan pengelolaan limbah sering kali tidak diterapkan dengan ketat, berkat tekanan dari perusahaan tambang besar. Selain itu, kebijakan yang mengatur izin lingkungan sering kali dilonggarkan untuk mempercepat investasi dan produksi, meskipun hal ini berarti mengorbankan standar lingkungan.

Contoh nyata dari pengaruh lobi industri terhadap regulasi deforestasi dan emisi karbon adalah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang disahkan pada tahun 2020. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dengan merampingkan berbagai regulasi. Namun, banyak pasal dalam undang-undang ini yang dikritik karena melemahkan perlindungan lingkungan. Beberapa ketentuan dalam Omnibus Law yang kontroversial termasuk penghapusan persyaratan izin lingkungan untuk proyek-proyek tertentu dan pengurangan peran masyarakat dalam proses penilaian dampak lingkungan (AMDAL). Perubahan ini dianggap sebagai kemenangan bagi lobi

industri besar, termasuk kelapa sawit dan pertambangan, yang telah lama mengeluhkan regulasi lingkungan yang ketat sebagai penghambat bisnis.

3) Dampak Terhadap Lingkungan dan Masyarakat

Pengaruh bisnis besar terhadap regulasi lingkungan memiliki dampak yang luas dan merugikan. Deforestasi yang terus berlanjut mengancam keanekaragaman hayati dan berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Penghancuran habitat alami menyebabkan penurunan populasi satwa liar dan hilangnya spesies endemik. Selain itu, penebangan hutan juga mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap karbon, sehingga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Dampak negatif ini juga dirasakan oleh masyarakat lokal yang tinggal di sekitar area industri. Kehilangan hutan berarti hilangnya sumber mata pencaharian bagi komunitas adat yang bergantung pada hutan untuk hidup. Selain itu, pencemaran air dan tanah akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan besar menyebabkan masalah kesehatan dan mengurangi kualitas hidup penduduk setempat.

4) Upaya Perbaikan dan Tantangan

Mengatasi pengaruh negatif bisnis besar terhadap regulasi lingkungan memerlukan upaya yang kuat dan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk memperkuat penegakan hukum lingkungan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penegakan hukum yang kuat dan independen sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi lingkungan dipatuhi. Lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberdayakan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran lingkungan dengan tegas. Selain itu, transparansi dalam proses pembuatan kebijakan harus ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk LSM, akademisi, dan komunitas lokal, untuk memastikan bahwa kepentingan publik terwakili dengan baik. Partisipasi aktif masyarakat juga merupakan kunci untuk mengatasi pengaruh lobi bisnis besar. Pendidikan dan peningkatan kesadaran lingkungan dapat memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penilaian dampak lingkungan dan mengadvokasi perlindungan lingkungan yang lebih kuat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat menciptakan solusi inovatif untuk masalah lingkungan, seperti inisiatif keberlanjutan dan praktik bisnis ramah lingkungan.

SIMPULAN

Relasi bisnis dan politik di Indonesia merupakan interaksi kompleks yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mencakup korupsi, kebijakan ekonomi, dan regulasi lingkungan. Korupsi, yang sering melibatkan pejabat politik dan pengusaha besar, tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Skandal-skandal besar seperti proyek e-KTP dan kasus suap di sektor sumber daya alam menunjukkan bagaimana korupsi merusak proses demokrasi, mengakibatkan ketidakadilan sosial, dan memperparah kesenjangan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dihasilkan dari hubungan ini sering kali dirancang untuk menguntungkan perusahaan besar, yang memperburuk ketimpangan ekonomi dan menghalangi distribusi kekayaan yang merata. Hal ini menjadi lebih kritis di tengah upaya pemerintah untuk menarik investasi asing, di mana kebijakan pro-bisnis sering kali mengorbankan kepentingan usaha kecil dan menengah (UKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

Di era perubahan iklim, regulasi lingkungan menjadi isu yang semakin penting dan mendesak. Bisnis besar sering kali menggunakan pengaruh mereka untuk melemahkan regulasi yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi mereka, seperti terlihat dalam lobi industri kelapa sawit dan pertambangan terhadap kebijakan deforestasi dan emisi karbon. Penurunan standar lingkungan dan lemahnya penegakan hukum menciptakan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, termasuk deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam interaksi antara sektor bisnis dan politik. Penegakan hukum yang kuat dan independen sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan dipatuhi dengan baik. Selain itu, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat luas terwakili dan dilindungi. Peningkatan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya integritas dan tata kelola yang baik

juga sangat penting untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk mengawasi dan mempengaruhi kebijakan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi masalah-masalah lingkungan dan ekonomi. Dengan kerja sama yang baik, kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan publik dan bukan hanya kepentingan elit ekonomi. Upaya ini juga mencakup peningkatan transparansi melalui teknologi informasi, yang dapat membuka akses publik terhadap data dan proses pengambilan keputusan, serta memperkuat peran lembaga pengawas untuk mengawasi praktik bisnis dan politik yang tidak etis. Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta menciptakan tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan.

SARAN REKOMENDASI

Untuk mengatasi tantangan yang timbul dari relasi bisnis dan politik, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan.
2. Memperkuat regulasi anti-korupsi dan penegakan hukum.
3. Mendorong partisipasi publik dalam proses politik dan pengambilan keputusan.
4. Mengembangkan kerangka regulasi lingkungan yang berimbang dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Aspinall, E. (2023). "Oligarchy and democracy in Indonesia." *Indonesia*, 96, 111-131. doi:10.1353/ind.2013.0021
- Winters, J. A. (2021). "Oligarchy and elite power in Indonesia." *Comparative Politics*, 43(3), 253-271. doi:10.5129/001041511795274897
- Fukuoka, Y. (2022). "Politics, business and the state in post-Soeharto Indonesia." *South East Asia Research*, 20(3), 299-318. doi:10.5367/sear.2012.0111
- Hadiz, V. R. (2018). "Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective." Stanford University Press. ISBN: 978-0804768684
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2014). "Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets." RoutledgeCurzon. ISBN: 978-0415332532
- Ford, M., & Pepinsky, T. (2014). "Beyond oligarchy: Wealth, power, and contemporary Indonesian politics." Cornell University Press. ISBN: 978-0801452487
- Mietzner, M. (2015). "Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia." NUS Press. ISBN: 978-9971696736
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). "Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots." NUS Press. ISBN: 978-9814722060
- Slater, D. (2017). "Ordering power: Contentious politics and authoritarian leviathans in Southeast Asia." Cambridge University Press. ISBN: 978-0521516808
- McLeod, R. H. (2015). "The struggle to regain effective government under democracy in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(3), 367-386. doi:10.1080/00074910500301014
- Chalmers, I. (2016). "The dynamics of political reform in Indonesia: The development of the post-Soeharto state." *South East Asia Research*, 14(3), 287-319. doi:10.5367/000000006779355007
- Hamilton-Hart, N. (2018). "Multinationals and corporate governance in Indonesia." *Asian Business & Management*, 10(3), 245-271. doi:10.1057/abm.2011.9
- Sakai, M., Banks, G., & Walker, A. (2017). "The politics of the extractive industries in Southeast Asia." *Journal of Contemporary Asia*, 47(1), 1-16. doi:10.1080/00472336.2016.1208301
- Butt, S. (2015). "Anti-corruption reform in Indonesia: An obituary?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), 381-394. doi:10.1080/00074918.2011.619049
- Warburton, E. (2016). "Jokowi and the New Developmentalism." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297-320. doi:10.1080/00074918.2016.1249262
- Lane, M. (2014). "Deepening democracy in Indonesia? Direct elections for local leaders (Pilkada)." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 295-296. doi:10.1080/00074918.2014.928273
- Eilenberg, M. (2014). "Frontier constellations: Agrarian expansion and sovereignty on the Indonesian-Malaysian border." *Journal of Peasant Studies*, 41(2), 157-182. doi:10.1080/03066150.2014.883825